

BAB III

OPERASI TANGKAP TANGAN TERKAIT KASUS SUAP JUAL BELI JABATAN DI KEMENTERIAN AGAMA JAWA TIMUR

A. Kasus Posisi

1. Kasus :

Suap Jual Beli Jabatan Di Kementerian Agama Jawa Timur.

2. Pasal yang di langgar :

Sebagai pihak yang diduga penerima suap, Rommy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Muafaq dan Haris melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk Muafaq, KPK mengenakan juncto dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸⁹

⁸⁹ Bangun Santoso, Welly Hidayat, “*KPK Ungkap Kronologi Dugaan Suap Ketum PPP Romahurmuziy*”, diakses dari <https://www.suara.com/news/2019/03/16/133039/kpk-ungkap-kronologi-dugaan-suap-ketum-ppp-romahurmuziy>, 15 Desember 2019 Pukul 17.00 WIB.

Muhammad Muafaq Wirahadi divonis 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Muafaq bersalah menyuap anggota DPR sekaligus mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy. Muafaq bersalah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, Haris Hasanudin divonis 2 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan. Haris dinyatakan bersalah menyuap anggota DPR yang juga mantan Ketua Umum PPP M Romahurmuziy (Romy). Majelis hakim menyatakan Haris bersalah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.⁹⁰

Kronologis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Selain Rommy, KPK turut menetapkan

⁹⁰ Ilma De Sabrini, *Kasus Suap Romy PPP: Haris Divonis 2 Tahun Penjara dan Muafaq 1,5 Tahun*, diakses dari <https://www.inews.id/news/nasional/kasus-suap-romy-ppp-haris-divonis-2-tahun-penjara-dan-muafaq-15-tahun>, 15 Desember 2019 Pukul 17.15 WIB.

tersangka dua pejabat Kemenag. Mereka Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin. Keduanya disangkakan sebagai pemberi suap untuk Rommy.⁹¹

Pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019, pukul 07.00 WIB tim KPK mendapat informasi bahwa sekitar pukul 07.00 WIB akan ada penyerahan uang dari Muafaq Wirahadi (MFQ) ke Rommy di Hotel Bumi Surabaya. Diduga terjadi penyerahan uang dari Haris Hasanuddin (HRS) kepada Rommy melalui Amin Nuryadin (ANY), yang merupakan asisten Rommy. Selain itu, pada pukul 07.30 WIB tim mendapatkan bukti adanya dugaan penyerahan uang. Tim mengamankan Muafaq Wirahadi dan sopirnya bersama Abdul Wahan (AHB), yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP. Mereka diamankan di Hotel Bumi Surabaya.

Dari Muafaq Wirahadi, KPK mengamankan uang Rp 17,7 juta dalam amplop putih. Setelah itu, tim mengamankan ANY, yang telah memegang sebuah tas kertas tangan dengan logo salah satu bank yang berisi uang Rp 50 juta. Selain itu, dari ANY diamankan uang Rp 70.200.000. Jadi total uang yang diamankan ANY Rp 120.200.000. kemudian pada pukul 07.50 WIB Tim KPK mengamankan Rommy di Hotel, dilanjutkan kembali pada pukul 08.40 WIB tim KPK mengamankan Haris (HRS) dan uang Rp 18,85 juta. Dilanjutkan kembali pada pukul 17.00 WIB Tim KPK mendatangi kantor

⁹¹ Bangun Santoso, Welly Hidayat, *KPK Ungkap Kronologi Dugaan Suap Ketum PPP Romahurmuziy*, diakses dari <https://www.suara.com/news/2019/03/16/133039/kpk-ungkap-kronologi-dugaan-suap-ketum-ppp-romahurmuziy>, 15 Desember 2019 Pukul 19.20 WIB.

Kemenag dan menyegel sejumlah ruangan diantaranya ruangan Menag dan ruangan Sekjen Kemenag.⁹²

Sekitar Pukul 17.00 WIB, Tim KPK mendatangi Kantor Kementerian Agama dan menyegel sejumlah ruangan, diantaranya ruangan Menteri Agama dan Sekjen Menteri Agama. Setelah semua target ditangkap, KPK lalu membawa mereka ke Mapolda Jawa Timur untuk pemeriksaan. Keenam orang tersebut kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih mendalam. Mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 20.13 WIB.

Pada pukul 20.30 WIB Sekjen Kemenag mendatangi KPK dilanjutkan proses klarifikasi hingga sekitar pukul 03.00 dini hari. Total uang yang diamankan oleh KPK berjumlah Rp 156.758.000.⁹³

Muafaq dan Haris diduga menyuap Rommy untuk memuluskan proses lolos seleksi jabatan di Kementerian Agama, dimana Muafaq mendaftar untuk mengisi posisi Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik sedangkan Haris mendaftar untuk menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Namun, ternyata pada bulan Februari 2019 Kementerian Agama menerima informasi bahwa nama Haris

⁹² Faiq Hidayat, *Kronologi KPK OTT Ketum PPP Romahurmuziy di Surabaya*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4469971/kronologi-kpk-ott-ketum-ppp-romahurmuziy-di-surabaya>, 15 Desember 2019 Pukul 19.50 WIB.

⁹³ CNN Indonesia, *Detik-detik KPK Tangkap Romi Terkait Suap jabatan Kemenag*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190316131620-12377831/detik-detik-kpk-tangkap-romi-terkait-suap-jabatan-kemenag>, 15 Desember 2019 Pukul 20.15 WIB.

tidak diusulkan ke Menteri Agama Lukman Hakim hal itu dikarenakan Haris sebelumnya pernah mendapatkan hukuman disiplin.

Kemudian, akhirnya haris dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Setelah Haris lolos seleksi dan telah menjabat sebagai Kakanwil Muafaq meminta bantuan kepada Haris untuk dipertemukan dengan Rommy guna memuluskan proses seleksinya. Hingga akhirnya pada tanggal 15 Maret semua yang terlibat dalam proses seleksi ini tertangkap oleh Tim KPK.

B. Contoh Kasus Serupa

1. Kasus :

Operasi Tangkap Tangan Terkait Kasus Suap Jual beli Jabatan Bupati Kudus

2. Pasal yang dilanggar:

Dalam kasus ini, Tamzil dan Agus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Akhmad Sofyan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kronologis

Bupati Kudus Muhammad Tamzil ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan. Tamzil diduga menerima suap untuk membayar utang sebesar 250 juta. Kasus ini merupakan kali kedua Tamzil terjerat kasus korupsi, diawali dengan pembicaraan Bupati Kudus MTZ (Muhammad Tamzil) yang meminta kepada Staff Khusus Bupati, ATO (Agus Soeranto) untuk mencarikan uang sebesar Rp 250 juta untuk kepentingan pembayaran utang pribadinya.⁹⁴ Padahal Tamzil terakhir kali melaporkan kekayaannya saat menjadi calon Bupati Kudus pada bulan Januari 2019, Tamzil tercatat mempunyai harta senilai Rp 912.991.616. Tamzil tercatat mempunyai tanah dan bangunan seluas 227 m²/230 m² di Semarang. Total nilai tanah dan bangunan itu Rp 663.071.000. dia juga tercatat mempunyai Mobil Nissan Termo tahun 2004 senilai Rp 270 juta, selain itu Tamzil mempunyai kas dan setera kas senilai Rp 9.920.616.

Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK ini dilakukan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019, pada pukul 09.30 WIB Tim KPK melihat

⁹⁴ Ibnu Hariyanto, "Ini Kronologi OTT Kasus Suap Jual Beli Jabatan Bupati Kudus", detikNews, Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4641891/ini-kronologi-ott-kasus-suap-jual-beli-jabatan-bupati-kudus>, 15 Desember 2019 Pukul 20.30 WIB.

ajudan tamzil, NOM, berjalan dari ruang kerja bupati ke rumah dinas Agus dengan membawa tas selempang. Tim menduga tas tersebut berisi uang. Kemudian enam menit setelah itu, tim mengamankan ajudan Tamzil NOM dan UWS di pendopo Kabupaten Kudus, tim lalu membawa kedua orang itu ke ruang kerja Agus.

Kemudian pada pukul 10.10 WIB Tim mengamankan Agus di rumah dinas yang berdekatan dengan ruang kerjanya di pendopo. Tim menemukan uang senilai Rp 170 juta. lima menit setelah mengamankan Agus, Tim mengamankan Tamzil di ruang kerja bupati. Dilanjutkan kembali pada pukul 12.00 WIB Tim melakukan penangkapan secara terpisah terhadap calon kepala Dinas Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), CW, dan Staf DPPKAD, SB.

Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Tim bergerak menangkap Agus di rumahnya. Lalu, pada tanggal 27 juli 2019 setelah dilakukan pemeriksaan awal terhadap tujuh orang yang diamankan di Polda Jateng dan Polres Kudus, Tim Membawa tujuh orang tersebut ke Gedung KPK.⁹⁵

Mereka yang ikut terkena OTT dalam kasus ini terdiri dari unsur Pemkab Kudus seperti staf serta calon Kepala Dinas setempat. Terkait kasus ini, semuanya termasuk Tamzil diperiksa oleh tim KPK selama 24 jam setelah penangkapan tersebut. Selain menangkap orang-orang tersebut.

⁹⁵ Ibnu Hariyanto, “*Ini Kronologi OTT Kasus Suap Jual Beli Jabatan Bupati Kudus*”, detikNews, Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4641891/ini-kronologi-ott-kasus-suap-jual-beli-jabatan-bupati-kudus>, 15 Desember 2019 Pukul 20.50 WIB.

KPK juga telah menggeledah sejumlah ruangan di Pemkab Kudus. Beberapa ruangan yang sudah digeledah pun sudah disegel petugas.⁹⁶ Dalam kasus suap ini di duga untuk pengisian jabatan di Kabupaten Kudus, dan untuk kepentingan Tamzil membayar cicilan utangnya.



⁹⁶ Agung Sandy Lesmana, Welly Hidayat, "Ditangkap KPK, Bupati Kudus M Tamzil Terlibat Suap Jual Beli Jabatan", Diakses dari <https://www.suara.com/news/2019/07/26/173941/ditangkap-kpk-bupati-kudus-m-tamzil-terlibat-suap-jual-beli-jabatan>, 15 Desember 2019 Pukul 20.45 WIB.